

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, (Bandung : Pustaka Setia, 2007)

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : Rajawali Press, 2015)

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Asshiddiqie, Jimly, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Azed, Abdul Bari, Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000)

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Chilcotte, Ronald, Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003)

Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011)

Hakim, Muhammad Aziz, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. (Jakarta : Tesis. UI, 2012)

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997)

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, (Bandung: Mandar Maju, 1993)

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998)

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta : Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, 2009)

Prihatmoko, Joko J., *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang : LP3i, 2003)

Purnama, Eddy, Negara Kedaulatan Rakyat : Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, (Malang : Nusa Media, 2007)

Riwanto, Agus, *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Safa'at, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

JURNAL :

Ahmad Izzudin, Ratna Herawati dan Lita Tyesta, “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilihan Umum”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019

Aminah, “Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia*, Vol.1, No.2,2012

Alfian, M. Alfian, “Otokritik Demokrasi Ekstra Liberal Pemilu 2009”, *Jurnal Negarawan*, No. 11, 2009

Arsil, Fitra, “Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 4, 2012

Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, “PELAKSANAAN ASAS PEMILU: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009”, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No. 1, 2009

Muhamad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilu DPR Proporsional Daftar Terbuka”, *RechtsVinding*, Vol. 3. No. 1, 2014

Okky Singgih Laksono Waskita Aji, Hasyim Asy’ari dan Lita Tyesta A.L.W, “Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2012”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016

Riwanto, Agus, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia”, *Yustisia* Vol. 4. No. 1, 2015

Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim, “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial”, Jurnal Penelitian Politik Vol. 10. No. 2, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008

TAP MPR RI No. XIV/MPR/1998

Penpres No. 3 Tahun 1960

Penpres No. 4 Tahun 1960

SUMBER LAIN :

Hak Dewan Perwakilan Rakyat, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses di Semarang pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 03.04 WIB.

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses di Semarang pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 03.24 WIB.

Buka-bukaan Biaya Caleg Demi Kursi Di Senayan, <https://jeo.kompas.com/buka-bukaan-biaya-caleg-demi-kursi-di-senayan>, diakses di Semarang pada tanggal 8 April 2020 pukul 03.36.

Mutu Lembaga Legislatif, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/18180051/mutu.lembaga.legislatif?pag>

e=all, diakses di Semarang pada tanggal 8 April 2020 pukul 04.40 WIB

Mutu Lembaga Legislatif menurut Siswono Yudo Husodo, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/18180051/mutu.lembaga.legislatif?page=all>, diakses di Semarang pada tanggal 9 April 2020 pukul 00.48 WIB

Pemilihan Umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005)